



**Laporan Kinerja Triwulan 1
Balai Bahasa Nusa Tenggara Barat
Tahun 2025**

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Balai Bahasa Nusa Tenggara Barat selama triwulan 1 tahun 2025.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target PK	Satuan	Target TW 1	Realisasi
[SK 1] Meningkatnya Kecakapan Literasi Membaca Peserta Didik				
[IKK 1.1] Persentase Peserta Didik yang Meningkatkan Kualitas Literasi Membaca	64	Persen	0	0
[IKK 1.2] Persentase Produk Penerjemahan yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik	19	Persen	0	0
[SK 2] Meningkatnya Kompetensi Penutur Bahasa Indonesia				
[IKK 2.1] Persentase Penutur Teruji yang sesuai dengan predikat kemahiran berbahasa profesinya	41	Persen	0	0
[IKK 2.2] Persentase Penutur Bahasa yang Meningkatkan Kualitas Berbahasanya	60	Persen	0	0
[SK 3] Meningkatnya Partisipasi Lembaga dan Komunitas dalam Program Kebahasaan dan Kesastraan				
[IKK 3.1] Persentase lembaga terbina yang meningkatkan kualitas penggunaan bahasanya	59,93	Persen	0	0
[IKK 3.2] Persentase komunitas penggerak literasi terbina yang meningkatkan kualitas kinerjanya	50	Persen	0	0
[SK 4] Meningkatnya Kualitas Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra				
[IKK 4.1] Persentase Penambahan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra yang Tervalidasi	11,55	Persen	0	0
[SK 5] Meningkatnya Fasilitas di Bidang Pelindungan Bahasa dan Sastra				
[IKK 5.1] Persentase Penambahan bahasa, sastra, dan aksara yang terverifikasi dalam peta kebinekaan	2,8	Persen	0	0
[IKK 5.2] Rasio Pengajar Bahasa Daerah Terhadap Penutur Muda yang Terimbas	1:18	Rasio	0	0
[SK 6] Meningkatnya fasilitas terhadap lembaga penyelenggara program BIPA				



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Sasaran/Indikator	Target PK	Satuan	Target TW 1	Realisasi
[IKK 6.1] Persentase Lembaga Penyelenggara Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) Terfasilitasi (Dalam Negeri)	50	Persen	0	0
[SK 7] Meningkatnya tata kelola Balai Bahasa Nusa Tenggara Barat				
[IKK 7.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Bahasa Nusa Tenggara Barat	Sangat Baik	Kategori	-	-
[IKK 7.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Bahasa Nusa Tenggara Barat minimal A	A	Predikat	-	-

B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[SK 1] Meningkatnya Kecakapan Literasi Membaca Peserta Didik

[IKK 1.1] Persentase Peserta Didik yang Meningkatkan Kualitas Literasi Membaca

Progress/Kegiatan

Pada Triwulan I Tahun 2025, pelaksanaan kegiatan yang mendukung [IKK 1.1] Persentase Peserta Didik yang Meningkatkan Kualitas Literasi Membaca belum dapat dilaksanakan, sehingga belum terdapat capaian yang dapat dilaporkan. Hal ini disebabkan oleh proses penyesuaian anggaran yang masih berlangsung, seiring dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Instruksi tersebut mengharuskan satuan kerja melakukan peninjauan ulang terhadap rencana kegiatan dan alokasi anggaran, sehingga berdampak langsung pada penjadwalan dan pelaksanaan program literasi yang direncanakan.

Selain itu IKK ini merupakan indikator baru yang mulai diimplementasikan pada Tahun Anggaran 2025. Hingga akhir Triwulan I, satuan kerja belum menerima petunjuk teknis (juknis) resmi terkait pelaksanaan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator tersebut. Ketidadaan juknis menyebabkan belum adanya kejelasan mengenai bentuk kegiatan, metode pengukuran, serta mekanisme pelaporan yang sesuai. Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan masih menunggu arahan lebih lanjut dari instansi pembina agar dapat dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Kendala/Permasalahan

Kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target IKK ini sebagai berikut.

1. Adanya penyesuaian anggaran terkait dengan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah tahun 2025 sehingga pelaksanaan kegiatan belum dapat dilakukan.
2. Adanya perubahan jenis target dan metode penghitungan yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya sehingga satuan kerja belum menerima petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan kegiatan secara resmi dari unit utama atau instansi pembina.
3. Belum adanya program atau kegiatan yang secara spesifik dirancang untuk mendukung pencapaian indikator ini pada awal tahun.

Strategi/Tindak Lanjut

Strategi yang dilakukan sebagai upaya mencapai target dalam pelaksanaan kegiatan yaitu:



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

1. melakukan koordinasi dengan instansi pembina
2. melakukan koordinasi internal kelompok kerja untuk merencanakan ulang kegiatan agar tetap relevan dan berdampak, namun sesuai dengan prinsip efisiensi anggaran sebagaimana diatur dalam Inpres Nomor 1 tahun 2025.

[SK 1] Meningkatnya Kecakapan Literasi Membaca Peserta Didik

[IKK 1.2] Persentase Produk Penerjemahan yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik

Progress/Kegiatan

Pada Triwulan I Tahun 2025, pelaksanaan kegiatan penerjemahan yang mendukung IKK 1.2 belum dapat dilaksanakan. Hal ini disebabkan oleh adanya blokir anggaran pada kode A sebesar 79,58% dari total pagu, yaitu senilai Rp759.954.000. Meskipun pagu anggaran mengalami pengurangan signifikan, target output tetap ditetapkan sebanyak 70 dokumen penerjemahan. Kondisi ini menuntut satuan kerja untuk melakukan penyesuaian strategi pelaksanaan agar tetap dapat memenuhi target dengan sumber daya yang terbatas.

Sisa pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp195.000.000 (20,42%) akan dimanfaatkan secara optimal oleh Kelompok Kerja Penerjemahan. Penyesuaian ini dilakukan dengan mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Hingga akhir Triwulan I, belum terdapat capaian yang dapat dilaporkan karena kegiatan belum dimulai. Namun, proses perencanaan dan penyesuaian teknis telah dilakukan sebagai langkah awal untuk memastikan efektivitas pelaksanaan di triwulan berikutnya.

Kendala/Permasalahan

Kendala dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target IKK ini adalah

1. Blokir anggaran kode A sebesar 79,58% menyebabkan keterbatasan dana untuk pelaksanaan kegiatan secara penuh.
2. Target output tetap meskipun pagu anggaran berkurang sehingga menuntut efisiensi tinggi dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Kebutuhan penyesuaian teknis terhadap format, metode dan volume penerjemahan agar sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Strategi/Tindak Lanjut

Strategi yang dilakukan sebagai upaya mencapai target dalam pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut.

1. Optimalisasi sisa anggaran dengan menyusun ulang rencana kerja Kelompok Kerja Penerjemahan agar lebih efisien dan berdampak.
2. Penguatan internal satuan kerja untuk memastikan setiap tahapan kegiatan berjalan sesuai rencana dan tetap mengarah pada pemenuhan target 70 dokumen.
3. Melakukan koordinasi internal kelompok kerja untuk merencanakan ulang kegiatan agar tetap relevan dan berdampak, namun sesuai dengan prinsip efisiensi anggaran sebagaimana diatur dalam Inpres No. 1 Tahun 2025.

[SK 2] Meningkatnya Kompetensi Penutur Bahasa Indonesia



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

[IKK 2.1] Persentase Penutur Teruji yang sesuai dengan predikat kemahiran berbahasa profesinya

Progress/Kegiatan

Progres capaian sampai dengan triwulan satu untuk [IKK 2.1] Persentase Penutur Teruji yang sesuai dengan predikat kemahiran berbahasa profesinya adalah sebesar 737 orang. IKK ini memiliki capaian output sebanyak 8.037 orang yang mengikuti UKBI selama tahun 2025. Target ini tidak diturunkan meski jumlah pagu pada triwulan 1 pagu yang aktif hanya sebesar Rp90.000.000 atau 25,71% dari Rp350.000.000,00. Jumlah pagu blokir A untuk IKK ini sebesar 74,29% atau sebesar Rp260.000.000,00 dari total pagu. Meskipun anggaran belum bisa direalisasikan pada triwulan satu, beberapa kegiatan sudah dilaksanakan oleh Tim Kelompok Kerja UKBI.

Kegiatan pertama dilaksanakan pada 7 Januari 2025, berupa pendampingan UKBI kepada dua siswa dari SMA Christian College Geelong, Australia, yaitu Claire dan Ruby. Kegiatan ini merupakan bagian dari program *Twin School* antara SMAN 2 Mataram dan Christian College Geelong. Selanjutnya, pada 20 Januari 2025, Balai Bahasa Provinsi NTB memberikan pendampingan dan sosialisasi UKBI kepada 20 mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram. Kegiatan ini bertujuan mempersiapkan mahasiswa menghadapi pengujian UKBI sebagai syarat kelulusan dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra.

Pada 23 Januari 2025, pengujian UKBI dilaksanakan kepada 150 siswa SD Gugus II Selong, Lombok Timur, di tiga lokasi: SDN 1, 2, dan 3 Pancor. Pengujian dilakukan dalam dua sesi (pukul 09.00 dan 11.00 Wita) dengan pengawasan langsung oleh Tim UKBI. Di hari yang sama, sesi ketiga pengujian dilaksanakan di SD Plus Muhammadiyah Selong dengan 50 peserta uji. Beberapa siswa yang terlambat mengikuti ujian dijadwalkan ulang pada 30 Januari 2025 secara mandiri.

Kegiatan berikutnya berlangsung pada 20 Februari 2025, berupa pendampingan dan pendaftaran UKBI Adaptif kepada sekitar 800 siswa SMAN 1 Gunungsari, mencakup kelas X dan XI. Terakhir, pada 27 Februari 2025, Balai Bahasa Provinsi NTB menerima kunjungan dari SD Lenterahati Islamic Boarding School dalam rangka kegiatan *outing class*. Sebanyak 36 siswa, didampingi dua guru, mengikuti simulasi UKBI di Aula Cilinaya sebagai bagian dari upaya peningkatan kemahiran berbahasa Indonesia.

Kendala/Permasalahan

Beberapa kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target adalah sebagai berikut

1. Blokir kode A sebesar 74,29% sehingga membatasi pelaksanaan kegiatan secara optimal di awal tahun
2. Keterbatasan dukungan teknis dan infrastruktur pengujian di sekolah. Beberapa sekolah belum memiliki perangkat dan jaringan yang memadai untuk pelaksanaan UKBI Adaptif, terutama di daerah terpencil
3. Variasi kesiapan peserta dan ketidaksesuaian jadwal. Terdapat peserta yang terlambat mengikuti sesi uji, sehingga perlu dijadwalkan ulang secara mandiri, yang berpotensi menurunkan efisiensi dan akurasi data capaian

Strategi/Tindak Lanjut

Beberapa strategi yang dilakukan sebagai upaya mencapai target dalam pelaksanaan kegiatan sebagai berikut.

1. Optimalisasi pendampingan dan sosialisasi berbasis kemitraan. Memperluas kolaborasi dengan sekolah dan perguruan tinggi melalui program reguler seperti *outing class*, *twin school*, dan pendampingan skripsi, agar UKBI menjadi bagian dari agenda akademik.
2. Segmentasi dan penjadwalan uji secara bertahap dan terintegrasi. Menyusun jadwal pengujian berdasarkan kelompok sasaran (mahasiswa, siswa SD/SMA) dan wilayah, serta mengintegrasikan UKBI ke dalam kegiatan semesteran agar lebih terstruktur.



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

[SK 2] Meningkatnya Kompetensi Penutur Bahasa Indonesia
[IKK 2.2] Persentase Penutur Bahasa yang Meningkatkan Kualitas Berbahasanya

Progress/Kegiatan

Progress capaian [IKK 2.2] Persentase Penutur Bahasa yang Meningkatkan Kualitas Berbahasanya sampai dengan triwulan satu adalah sebesar 100 orang dari target rincian output sebesar 275 orang. Capaian ini merupakan hasil dari pelaksanaan kegiatan Kemahiran Berbahasa Indonesia di Lombok Timur. Kemahiran Berbahasa Indonesia menjadi salah satu program Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat yang konsisten dilaksanakan sebagai upaya peningkatan kualitas kebahasaan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada tahun 2025 ini, pelaksanaan program tersebut menyasar Kabupaten Lombok Timur. Kegiatan ini diikuti pegawai pemerintah, swasta, tenaga pendidik, dan wartawan media massa cetak dan elektronik. Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Rupatama 2, Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur ini menghadirkan **100 peserta**. Kegiatan ini mengundang 50 peserta dari OPD, 20 guru sekolah swasta, dan 20 guru dari sekolah negeri, serta 10 lainnya adalah wartawan dan generasi muda. Pelaksanaan kegiatan selama dua hari, Jumat-Sabtu, 7-8 Februari 2025.

Pada IKK ini terdapat blokir anggaran kode A sebesar 66,69% atau Rp180.228.000,00 dari total pagu sebesar Rp270.228.000,00 sehingga membutuhkan koordinasi internal untuk menyesuaikan bentuk kegiatan yang tetap relevan tetapi sesuai dengan ketentuan efisiensi yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan ini masih belum selesai karena sesuai juknis masih ada tahap berikutnya yaitu kelas pendampingan daring, tes UKBI, dan pengisian tes akhir. Proses lanjutan ini akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya.

Kendala/Permasalahan

Beberapa kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target adalah sebagai berikut.

1. Blokir anggaran kode A yang signifikan. Sebesar 66,69% dari total pagu anggaran (masih diblokir, sehingga pelaksanaan kegiatan harus disesuaikan dengan alokasi yang sangat terbatas.
2. Tahapan kegiatan belum selesai sesuai juknis. Kegiatan inti baru mencakup pelatihan tatap muka, sementara tahapan lanjutan seperti kelas pendampingan daring, tes UKBI, dan pengisian tes akhir belum dilaksanakan pada triwulan ini.
3. Kebutuhan koordinasi internal yang intensif. Penyesuaian bentuk kegiatan agar tetap relevan dan efisien memerlukan koordinasi lintas tim dan unit, yang bisa mempengaruhi kecepatan eksekusi program.

Strategi/Tindak Lanjut

Beberapa strategi yang dilakukan sebagai upaya mencapai target dalam pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut.

1. Optimalisasi kegiatan daring dan pemanfaatan teknologi. Peserta dibuatkan kelas daring melalui WhatsApp untuk komunikasi tanpa batas dan *platform* daring lainnya untuk menghemat biaya operasional sekaligus memperluas jangkauan peserta.
2. Penguatan kolaborasi dengan pemerintah daerah dan mitra lokal untuk memastikan keterlibatan peserta dalam mengikuti kegiatan sampai tahap akhir.

[SK 3] Meningkatnya Partisipasi Lembaga dan Komunitas dalam Program Kebahasaan dan Kesastraan

[IKK 3.1] Persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya

Progress/Kegiatan

[IKK 3.1] Persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya ini direncanakan akan dilaksanakan pada triwulan III. Tim Kelompok Kerja Pembinaan dan Bahasa Hukum (Pembahu) pada



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

triwulan satu tetap melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan seperti pengusulan ulang bentuk dan lokasi kegiatan yang untuk menyesuaikan jumlah anggaran yang tersedia. Selain itu, Tim Kerja Pembahu juga menyiapkan juknis kegiatan terbaru yang disusun relevan dengan ketentuan pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Terdapat blokir kode A sebesar 70% atau Rp116.675.000,00 dari total pagu sebesar Rp166.675.000,00. Keterbatasan ruang gerak karena pembatasan anggaran mengharuskan Tim Kerja menyeleksi dengan ketat metode dan tahapan-tahapan kegiatan agar tetap relevan dan bisa mencapai target RO yang telah ditetapkan yaitu 45 lembaga terbina.

Kendala/Permasalahan

Tim Kerja Pembinaan dan Bahasa Hukum (Pembahu) menghadapi keterbatasan dalam merancang kegiatan yang mencakup 45 lembaga terbina. Hal ini berdampak pada pemilihan metode, lokasi, dan intensitas pendampingan yang dapat diberikan.

Strategi/Tindak Lanjut

Memperkuat kerjasama dengan pemerintah daerah baik itu lembaga pemerintah, swasta, dan lembaga pendidikan untuk mendukung komitmen lembaga terpilih bisa mengikuti kegiatan baik daring maupun luring sampai tahap akhir kegiatan.

[SK 3] Meningkatnya Partisipasi Lembaga dan Komunitas dalam Program Kebahasaan dan Kesastraan

[IKK 3.2] Persentase komunitas penggerak literasi terbina yang meningkat kualitas kinerjanya

Progress/Kegiatan

Pada triwulan satu ini, [IKK 3.2] Persentase komunitas penggerak literasi terbina yang meningkat kualitas kinerjanya ini belum dilaksanakan. Tim Kerja masih menunggu arahan dari Eselon Pembina terkait perubahan nomenklatur kementerian yang akan mengubah sasaran kegiatan. Sasaran kegiatan lebih diutamakan pada komunitas literasi pada komunitas sekolah. Selain itu, pelaksanaan kegiatan pada triwulan 1 ini juga harus disesuaikan dengan ketentuan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Meskipun begitu, Balai Bahasa Provinsi NTB tetap terlibat aktif dalam kegiatan yang mendukung pengembangan literasi di NTB. Pada 7 Maret 2025, Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat ikut serta dalam menyusun Pengembangan Dokumen *Roadmap* Literasi di Kabupaten Lombok Tengah yang diselenggarakan oleh Inovasi NTB. Tujuan kegiatan yang dilaksanakan selama dua hari, yaitu Jumat dan Sabtu, 7--8 Maret 2025 adalah membangun kemampuan fondasi literasi agar setiap satuan SD/MI memahami cara membangun kemampuan dasar literasi yang efektif bagi siswa sekolah dasar, kualitas konten pembelajaran dianggap belum mampu meningkatkan literasi siswa, adanya refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru, adanya pengalaman pelatihan PTK, dan pemanfaatan TIK untuk pengelolaan anggaran aplikasi di bidang pendidikan agar dapat membantu kemudahan dalam pembelajaran literasi.

IKK ini memiliki anggaran pagu yang cukup besar yaitu Rp608.000.000,00 tetapi pada triwulan satu masih terblokir kode A dengan jumlah yang sangat signifikan yaitu 95,89%. Ini artinya pagu yang tersedia dan bisa digunakan adalah sebesar 4,11% atau Rp25.000.000,00.

Kendala/Permasalahan

1. Beberapa kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target adalah sebagai berikut.



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

2. Ketidakpastian sasaran akibat perubahan nomenklatur kementerian. Tim Kerja belum dapat melaksanakan kegiatan karena masih menunggu arahan resmi dari Eselon Pembina terkait perubahan nomenklatur kementerian yang berdampak langsung pada penyesuaian sasaran kegiatan, khususnya peralihan fokus ke komunitas literasi sekolah.
3. Blokir anggaran yang sangat signifikan (95,89%). Dari total pagu Rp608.000.000,00, hanya Rp25.000.000,00 (4,11%) yang tersedia untuk digunakan pada Triwulan I. Kondisi ini membatasi ruang gerak Tim Kerja dalam merancang dan mengeksekusi kegiatan yang berdampak langsung terhadap komunitas sasaran.

Strategi/Tindak Lanjut

Beberapa strategi yang dilakukan sebagai upaya mencapai target dalam pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut.

1. Pemanfaatan kegiatan kolaboratif sebagai langkah awal. Melibatkan Balai Bahasa NTB dalam kegiatan lintas instansi seperti penyusunan Roadmap Literasi bersama Inovasi NTB dapat menjadi strategi awal untuk tetap berkontribusi dalam penguatan literasi, sekaligus membangun jejaring komunitas sasaran secara bertahap.
2. Penyusunan ulang rencana kegiatan yang adaptif dan efisien. Tim Kerja dapat menyiapkan draft kegiatan alternatif yang relevan dengan komunitas sekolah, dengan format yang hemat anggaran (misalnya pelatihan daring, pendampingan berbasis modul, atau lokakarya virtual), sesuai dengan ketentuan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja.

[SK 4] Meningkatnya Kualitas Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra

[IKK 4.1] Persentase Penambahan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra yang Tervalidasi

Progress/Kegiatan

Pada Triwulan I, pelaksanaan kegiatan terkait [IKK 4.1]—Persentase Penambahan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra yang Tervalidasi—berfokus pada tahap persiapan teknis dan administratif untuk mendukung kegiatan utama, yaitu Inventarisasi Kosakata Bahasa Daerah dan Pengembangan Kamus. Tim Kerja Kamus dan Istilah melakukan penyusunan ulang Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai tindak lanjut terhadap Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Penyesuaian ini dilakukan untuk memastikan bahwa alokasi anggaran tetap mendukung keluaran yang berkualitas dan relevan dengan prinsip efektivitas dan efisiensi yang ditetapkan secara nasional.

Selain penyesuaian RAB, Tim juga menyusun Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) yang telah diselaraskan dengan arah kebijakan terbaru serta menyusun instrumen pengumpulan data yang akan digunakan pada Triwulan II. Instrumen ini dirancang untuk menjamin validitas dan keterukuran data kosakata yang akan diinventarisasi, sehingga produk kamus yang dihasilkan nantinya memenuhi standar pengembangan bahasa dan sastra yang ditetapkan.

Kendala/Permasalahan

Beberapa kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target adalah sebagai berikut.

1. Blokir anggaran kode A sebesar 38,63 66,69% dari total pagu anggaran sehingga pelaksanaan kegiatan harus disesuaikan dengan alokasi yang sangat terbatas.
2. Terdapat pembatasan perjalanan dinas sehingga pengambilan data untuk bahasa daerah di luar pulau Lombok (bahasa Samawa dan Mbojo) tidak bisa lagi dilakukan pada tahun anggaran 2025.



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Strategi/Tindak Lanjut

Beberapa strategi yang dilakukan sebagai upaya mencapai target dalam pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut.

1. Mengoptimalkan anggaran yang tersedia untuk seluruh tahapan dalam kegiatan dengan menyesuaikan metode pelaksanaan kegiatan untuk mendukung kualitas keluaran.
2. Mengoptimalkan pengambilan data di Pulau Lombok dengan menyasar pada lema-lema yang spesifik pada daerah pengambilan data yang sebelumnya belum pernah dilakukan kegiatan sejenis.

[SK 5] Meningkatnya Fasilitas di Bidang Pelindungan Bahasa dan Sastra

[IKK 5.1] Persentase Penambahan bahasa, sastra, dan aksara yang terverifikasi dalam peta kebinekaan

Progress/Kegiatan

Pada Triwulan I Tahun 2025, pelaksanaan [IKK 5.1]—Persentase Penambahan Bahasa, Sastra, dan Aksara yang Terverifikasi dalam Peta Kebinekaan—belum dapat dilaksanakan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh status IKK sebagai kegiatan baru yang belum memiliki petunjuk teknis resmi dari unit pusat, sehingga menimbulkan variasi penafsiran antar satuan kerja terkait mekanisme pelaksanaannya. Ketidakteraturan ini berdampak pada tertundanya proses identifikasi, verifikasi, dan pelaporan unsur kebinekaan bahasa, sastra, dan aksara yang seharusnya menjadi dasar dalam pemetaan.

Selain itu, pelaksanaan IKK ini turut terdampak oleh Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, yang mewajibkan seluruh satuan kerja melakukan penyesuaian kembali terhadap rincian anggaran kegiatan. Penyesuaian ini diperlukan agar pelaksanaan program tetap relevan, efisien, dan berdampak sesuai arah kebijakan nasional. Meskipun belum terdapat capaian kuantitatif pada triwulan ini, langkah-langkah penyesuaian dan koordinasi yang telah dilakukan menjadi fondasi penting bagi pelaksanaan IKK secara terarah dan terstandar pada periode berikutnya.

Kendala/Permasalahan

Beberapa kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target adalah sebagai berikut.

1. Penyesuaian Anggaran: Pelaksanaan kegiatan masih terkendala oleh penyesuaian anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
2. IKK Baru: IKK ini merupakan indikator baru yang mulai diimplementasikan pada Tahun Anggaran 2025, sehingga satuan kerja belum menerima petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan kegiatan secara resmi dari instansi pembina.

Strategi/Tindak Lanjut

Beberapa strategi yang dilakukan sebagai upaya mencapai target dalam pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut.

1. Melakukan koordinasi dengan Instansi Pembina.
2. Melakukan koordinasi internal kelompok kerja untuk merencanakan ulang kegiatan agar tetap relevan dan berdampak, namun sesuai dengan prinsip efisiensi anggaran sebagaimana diatur dalam Inpres No. 1 Tahun 2025.



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

[SK 5] Meningkatnya Fasilitas di Bidang Pelindungan Bahasa dan Sastra

[IKK 5.2] Rasio Pengajar Bahasa Daerah Terhadap Penutur Muda yang Terimbas

Progress/Kegiatan

Pada Triwulan I Tahun 2025, pelaksanaan [IKK 5.2]—Rasio Pengajar Bahasa Daerah terhadap Penutur Muda yang Terimbas—belum sepenuhnya dapat direalisasikan. Hal ini disebabkan oleh dampak dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD, yang mengharuskan penyesuaian anggaran secara menyeluruh, termasuk pembatasan jumlah perjalanan dinas. Sebagian akun perjalanan dinas pada kegiatan Revitalisasi Bahasa Daerah dialihkan ke akun jasa lainnya, sehingga metode pelaksanaan kegiatan harus disesuaikan melalui kerja sama dengan pihak ketiga seperti event organizer. Penyesuaian ini menuntut adaptasi teknis dan administratif yang belum sepenuhnya tuntas pada triwulan ini.

Meski terdapat kendala dalam pelaksanaan kegiatan utama, Balai Bahasa Provinsi NTB tetap menunjukkan komitmen terhadap pelindungan bahasa daerah melalui penyelenggaraan Perayaan Hari Bahasa Ibu Internasional pada 26 Februari 2025. Kegiatan ini mencakup selebrasi pemenang Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI) Tahun 2024, seminar tentang Revitalisasi Bahasa Daerah, serta pelatihan mendongeng bagi guru PAUD, TK, dan SD. Sebanyak 84 peserta dari berbagai elemen masyarakat hadir, termasuk guru, siswa, mahasiswa, pegiat komunitas, dan perwakilan dinas. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menjaga semangat pelindungan bahasa daerah, sekaligus memperkuat sinergi antara pengajar dan penutur muda dalam mendukung pendidikan yang bermutu dan berakar pada kekayaan bahasa lokal.

Kendala/Permasalahan

Beberapa kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target adalah sebagai berikut.

1. Pembatasan perjalanan dinas akibat Inpres No. 1 Tahun 2025 yang menyebabkan pengurangan signifikan pada alokasi perjalanan dinas.
2. Pada IKK ini terdapat blokir pagu kode A dan kode 2 sebesar 42,98% atau Rp582.572.000,00 dari total pagu sebesar Rp1.352.974.000,00.
3. Revisi anggaran perjalanan ke jasa lainnya memerlukan waktu dan koordinasi tambahan, sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi tidak optimal dalam triwulan ini.

Strategi/Tindak Lanjut

Beberapa strategi yang dilakukan sebagai upaya mencapai target dalam pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut.

1. Koordinasi internal dengan Kepala Balai, PPK, dan Perencana, serta koordinasi yang intensif dengan instansi pembina dalam rangka penentuan arah kebijakan baru terkait pelaksanaan kegiatan.
2. Melakukan persiapan terkait tata cara pelaksanaan anggaran melalui EO (event organizer) sehingga kegiatan yang akan dilaksanakan tetap relevan dengan hasil yang optimal dan sejalan dengan ketentuan efisiensi.

[SK 6] Meningkatnya fasilitas terhadap lembaga penyelenggara program BIPA

[IKK 6.1] Persentase Lembaga Penyelenggara Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) Terfasilitasi (Dalam Negeri)

Progress/Kegiatan

Alokasi anggaran untuk IKK 6.1 belum dapat direalisasikan selama Triwulan I akibat pagu blokir yang mencapai 89,78% dari total anggaran, Tim Kerja BIPA Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat tetap menunjukkan inisiatif dan komitmen dalam mendukung fasilitas lembaga penyelenggara Program BIPA. Salah satu kegiatan yang telah dilaksanakan adalah **pengajaran BIPA di Pondok Pesantren Dea**



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Malela, Sumbawa, pada 14 Februari 2025. Kegiatan ini menysasar **19 siswa asing** tingkat SMP dan SMA yang berasal dari Thailand, Rusia, Taiwan, dan Pakistan, dengan fokus pembelajaran pada aspek kata dan morfologi bahasa Indonesia.

Pembelajaran tersebut mengungkap tantangan khas yang dihadapi pemelajar asing, seperti kesulitan membedakan kata kerja dasar dan kata kerja berimbuhan me-. Contohnya, Aliyan Khan dari Pakistan menunjukkan kesulitan dalam memahami struktur kata berimbuhan, yang merupakan fenomena umum dalam pembelajaran BIPA. Kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana peningkatan kompetensi bahasa peserta, tetapi juga sebagai bentuk fasilitasi langsung terhadap lembaga penyelenggara BIPA dalam negeri, meskipun belum tercatat sebagai realisasi anggaran.

Selain itu, pada 19 Maret 2025, Balai Bahasa NTB menerima kunjungan dari APPBIPA NTB sebagai bagian dari koordinasi lanjutan untuk pengembangan pengajaran BIPA. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan rencana pelaksanaan Lokakarya Pelatihan Pengembangan Pengajaran BIPA Berbasis AI, yang semula dijadwalkan pada 16 April 2025 dan kemungkinan diundur ke awal Mei. Kegiatan ini dirancang sebagai strategi adaptif terhadap keterbatasan anggaran dan sebagai bentuk sinergi kelembagaan dalam meningkatkan kualitas fasilitasi program BIPA di wilayah NTB, sejalan dengan arahan efisiensi dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025.

Kendala/Permasalahan

Beberapa kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target adalah sebagai berikut.

1. Pagu blokir yang signifikan yaitu sebesar 89,78% dari total anggaran kegiatan masih diblokir, sehingga pelaksanaan kegiatan fasilitasi belum dapat direalisasikan secara optimal pada Triwulan I.
2. Keterbatasan metode pelaksanaan agar sejalan dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi menyebabkan perlunya revisi teknis dan penjadwalan ulang kegiatan.

Strategi/Tindak Lanjut

Beberapa strategi yang dilakukan sebagai upaya mencapai target dalam pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut.

1. Optimalisasi kegiatan non-anggaran dengan melaksanakan kegiatan berbasis kemitraan dan inisiatif internal seperti pengajaran BIPA di lembaga mitra dan koordinasi dengan APPBIPA untuk menjaga progres meskipun belum ada realisasi anggaran.
2. Penyesuaian rencana kegiatan berbasis efisiensi dengan merancang ulang kegiatan fasilitasi agar lebih hemat biaya, seperti lokakarya daring, pemanfaatan teknologi AI dalam pelatihan, dan kolaborasi lintas instansi untuk berbagi sumber daya.

[SK 7] Meningkatkan tata kelola Balai Bahasa Nusa Tenggara Barat

[IKK 7.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Bahasa Nusa Tenggara Barat

Progress/Kegiatan

Pada Triwulan I Tahun 2025, pelaksanaan anggaran di Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalami penyesuaian signifikan sebagai tindak lanjut atas Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi. Penyesuaian ini berdampak pada proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran, di mana realisasi anggaran hanya dapat dilakukan untuk komponen RO Dukungan Manajemen. Komponen tersebut mencakup pembayaran gaji pegawai, layanan perkantoran, serta operasional umum yang mendukung keberlangsungan fungsi kelembagaan. Selain itu, belanja kontraktual untuk alih daya tenaga kebersihan, pengemudi, dan tenaga keamanan telah berhasil direalisasikan sesuai ketentuan efisiensi dan regulasi yang berlaku.

Meskipun terdapat keterbatasan dalam ruang gerak anggaran, capaian Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

(IKPA) Balai Bahasa NTB pada periode Januari hingga Maret 2025 tetap menunjukkan performa maksimal dengan nilai **100**. Capaian ini diperoleh berkat adanya dispensasi dari Kementerian untuk seluruh satuan kerja, termasuk Balai Bahasa NTB, sebagai respons atas kondisi transisi kelembagaan. Faktor-faktor yang memengaruhi antara lain pagu blokir yang masih berlangsung, penyesuaian nomenklatur dan kode satuan kerja, serta pergantian pimpinan instansi. Dispensasi ini memungkinkan penilaian IKPA tetap optimal meskipun realisasi anggaran belum sepenuhnya mencerminkan pelaksanaan program.

Secara kuantitatif, total realisasi anggaran pada Triwulan I mencapai Rp1.107.185.413 atau **10,33%** dari total pagu sebesar Rp10.719.277.000. Realisasi ini terdiri atas 25,47% untuk Belanja Pegawai (Rp636.714.943 dari pagu Rp2.500.000.000) dan 5,72% untuk Belanja Barang (Rp470.470.470 dari pagu Rp8.219.277.000). Dalam IKK ini terdapat juga pagu blokir kode A 22,89% atau sebesar Rp1.077.178.000 dari total pagu sebesar Rp4.706.424.000. Meskipun angka realisasi masih tergolong rendah, hal ini telah sesuai dengan strategi efisiensi dan pengendalian anggaran yang ditetapkan secara nasional. Balai Bahasa NTB tetap menjaga akuntabilitas dan ketepatan waktu dalam pelaporan, sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola keuangan yang transparan dan adaptif.

Kendala/Permasalahan

Beberapa kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target adalah sebagai berikut.

1. Ruang gerak anggaran yang terbatas. Realisasi anggaran hanya diperbolehkan untuk komponen RO Dukungan Manajemen, sehingga pelaksanaan program non-manajerial tertunda.
2. Pagu blokir dan penyesuaian kode satuan kerja pada dokumen administratif Balai. Sebagian besar anggaran masih diblokir (22,89% dari total pagu), ditambah proses penyesuaian nomenklatur dan kode satker yang memperlambat eksekusi anggaran.
3. Transisi kelembagaan dan pergantian pimpinan. Perubahan struktur organisasi dan kepemimpinan menyebabkan perlunya adaptasi dalam perencanaan dan pelaporan, serta potensi ketidaksinkronan antar unit kerja.

Strategi/Tindak Lanjut

Beberapa strategi yang dilakukan sebagai upaya mencapai target dalam pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut.

1. Optimalisasi Komponen RO Dukungan Manajemen. Fokus pada realisasi belanja pegawai dan kontraktual (kebersihan, keamanan, pengemudi) untuk menjaga keberlangsungan fungsi kelembagaan secara efisien dan sesuai regulasi.
2. Pemanfaatan dispensasi penilaian IKPA sebagai ruang strategis untuk menjaga nilai IKPA tetap maksimal sambil menyusun penyesuaian teknis dan administratif.
3. Penguatan tata kelola dan ketepatan laporan dengan menjaga akuntabilitas melalui pelaporan tepat waktu dan transparan, sebagai bentuk komitmen terhadap efisiensi nasional dan adaptasi kelembagaan.

[SK 7] Meningkatnya tata kelola Balai Bahasa Nusa Tenggara Barat

[IKK 7.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Bahasa Nusa Tenggara Barat minimal A

Progress/Kegiatan

Pada Triwulan I Tahun 2025, Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat menunjukkan komitmen kuat



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) melalui tiga kegiatan utama: perencanaan, penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024, dan tindak lanjut atas Lembar Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Tahun 2024. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya mempertahankan predikat akuntabilitas minimal A sesuai indikator kinerja [IKK 7.2]. Dalam konteks penyesuaian kebijakan nasional, Balai Bahasa NTB telah mengadakan serangkaian rapat internal untuk merespons Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi, termasuk revisi anggaran dan penyesuaian terhadap kode blokir A.

Rapat **perencanaan** pertama dilaksanakan pada 31 Januari 2025 dengan tujuan menyamakan persepsi seluruh pegawai dalam menyusun anggaran yang lebih efisien dan terarah. Kegiatan ini juga difokuskan pada penguatan dokumen perencanaan seperti Kerangka Acuan Kinerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan proposal kegiatan. Rapat lanjutan pada 7 Februari 2025 membahas tindak lanjut hasil rapat pimpinan dan penyesuaian jadwal kegiatan Februari-Maret 2025. Dinamika kebijakan dari lembaga pembina menuntut satuan kerja untuk terus beradaptasi secara cepat dan tepat dalam pelaksanaan program dan anggaran. Sebagai bagian dari proses penyesuaian belanja prioritas, Balai Bahasa NTB melaksanakan rapat pada 18 Februari 2025 untuk menindaklanjuti surat dari Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa terkait restrukturisasi efisiensi anggaran. Rapat ini menghasilkan penyesuaian jenis belanja yang diperbolehkan dan pembatasan belanja yang harus dialihkan ke kegiatan strategis.

Di sisi lain, penyusunan **Laporan Kinerja Tahun 2024** telah dimulai sejak November 2024 dan dilanjutkan dengan validasi data capaian kinerja oleh Tim Penyusun bersama Kepala Balai pada 8 Januari 2025. Validasi dilakukan terhadap data realisasi anggaran, capaian per IKK dan RO, serta konfirmasi langsung kepada Ketua Tim Kerja. Rapat Reviu Laporan Kinerja Tahun 2024 yang dilaksanakan pada 24 Januari 2025 menjadi momentum penting untuk memastikan kualitas sajian data dan akuntabilitas laporan. Kepala Balai menekankan pentingnya reviu menyeluruh terhadap aspek kebahasaan, validitas data, serta dokumentasi hambatan dan kendala yang relevan. Tim Reviu bertugas memastikan bahwa laporan tidak hanya memenuhi standar teknis, tetapi juga mencerminkan pertanggungjawaban kinerja yang kredibel dan transparan. Kegiatan ini melibatkan seluruh pegawai berdasarkan bidang Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional (KKLP), sehingga proses penyusunan menjadi kolaboratif dan komprehensif.

Tindak lanjut atas LHE AKIP Tahun 2024 juga telah dilakukan pada Triwulan I dengan pengumpulan data untuk diinput ke aplikasi SPASIKITA. Meskipun proses input masih terkendala oleh perubahan nomenklatur kementerian dan penyesuaian domain laman, Balai Bahasa NTB tetap menunjukkan komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan. Upaya ini mencerminkan keseriusan satuan kerja dalam menjaga akuntabilitas kinerja dan memastikan bahwa seluruh proses pelaporan dan evaluasi berjalan sesuai dengan prinsip transparansi dan efektivitas kelembagaan.

Kendala/Permasalahan

Beberapa kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target adalah sebagai berikut.

1. Perubahan kebijakan yang cepat dan mendadak. Adanya revisi anggaran dan pembatasan belanja akibat Inpres No. 1 Tahun 2025 serta surat edaran dari lembaga pembina menyebabkan perlunya penyesuaian dokumen dan jadwal kegiatan secara cepat.
2. Keterbatasan teknis dalam penginputan LHE AKIP. Proses input data ke aplikasi SPASIKITA terkendala oleh perubahan nomenklatur kementerian dan domain laman, sehingga menghambat kelancaran pelaporan tindak lanjut.
3. Validasi data kinerja yang memerlukan konfirmasi lintas tim. Proses validasi capaian kinerja memerlukan koordinasi intensif dengan Ketua Tim Kerja, yang menyita waktu dan berisiko menimbulkan ketidaksesuaian data jika tidak dilakukan secara menyeluruh.
4. Kualitas sajian laporan yang belum seragam. Dalam reviu Laporan Kinerja, ditemukan ketidakteraturan dalam ejaan, format, dan penyajian data yang belum sepenuhnya memenuhi standar akuntabilitas dan kebahasaan.

Strategi/Tindak Lanjut

Beberapa strategi yang dilakukan sebagai upaya mencapai target dalam pelaksanaan kegiatan adalah



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

sebagai berikut.

1. Penguatan koordinasi internal melalui rapat terstruktur. Menjadwalkan rapat rutin lintas bidang untuk menyamakan persepsi, mempercepat adaptasi kebijakan, dan memastikan seluruh pegawai memahami arah efisiensi dan prioritas belanja.
2. Optimalisasi tim validasi dan revidi laporan kinerja. Tim Revidi melakukan validasi data dan revidi kebahasaan agar proses penyusunan laporan lebih efisien, akurat, dan sesuai standar akuntabilitas.
3. Pendampingan teknis untuk penginputan SPASIKITA. Mengupayakan komunikasi aktif dengan admin pusat dan melakukan simulasi input data agar kendala teknis dapat diantisipasi lebih awal.
4. Memedomani format penyajian laporan kinerja dari instansi pembina mencakup format, gaya bahasa, dan standar penyajian data agar seluruh tim memiliki acuan yang seragam dalam menyusun laporan.

C. Realisasi Fisik dan Anggaran per-Rincian Output

No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
1	[DI.7569.PEG.001] Perhelatan Karya Kreatif Literasi Kebahasaan dan Kesastraan	Kegiatan	0	2	Rp614.370.000	Rp309.354.150	50.35
2	[DI.7569.QDC.001] Penutur bahasa terbina	Orang	100	198	Rp270.228.000	Rp135.893.950	50.29
3	[DI.7569.QDC.002] Penutur bahasa teruji	Orang	0	4255	Rp350.000.000	Rp146.258.100	41.79
4	[DI.7569.QDC.003] Generasi muda terbina program literasi	Orang	0	400	Rp524.386.000	Rp247.786.439	47.25
5	[DI.7569.QMA.002] Produk Kamus dan Pedoman Kebahasaan	dokumen	0	0	Rp145.365.000	Rp65.658.176	45.17
6	[DI.7569.QMA.003] Produk Penerjemahan	dokumen	0	17	Rp1.129.554.000	Rp603.698.769	53.45
7	[DU.7566.PEG.001] Perhelatan Karya Kreatif Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah	Kegiatan	0	0	Rp547.026.000	Rp16.184.400	2.96
8	[DU.7566.QDC.001] Penutur Bahasa Daerah Terfasilitasi Program Pelindungan Bahasa Daerah	Orang	0	180	Rp1.235.238.000	Rp978.822.743	79.24



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
9	[DU.7566.QMA.002] Peta Kebinekaan Bahasa dan Sastra	dokumen	0	0	Rp114.870.000	Rp45.796.500	39.87
10	[DU.7567.BDB.001] Lembaga Terfasilitasi Layanan Profesional Kebahasaan	Lembaga	0	0	Rp166.675.000	Rp31.979.200	19.19
11	[DU.7567.BDB.002] Komunitas Penggerak Literasi Terbina	Lembaga	0	57	Rp608.000.000	Rp307.123.430	50.51
12	[DU.7568.QDB.001] Lembaga Terfasilitasi Program BIPA	Lembaga	0	5	Rp98.296.000	Rp28.842.600	29.34
13	[WA.7613.EBA.956] Layanan BMN	Dokumen	0	0	Rp10.000.000	Rp2.334.500	23.35
14	[WA.7613.EBA.958] Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Dokumen	0	0	Rp216.578.000	Rp29.331.057	13.54
15	[WA.7613.EBA.960] Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Dokumen	0	0	Rp60.390.000	Rp1.810.000	3.00
16	[WA.7613.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	0	0	Rp182.857.000	Rp98.650.771	53.95
17	[WA.7613.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	0	0	Rp4.000.000.000	Rp2.587.401.373	64.69
18	[WA.7613.EBD.953] Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen	0	0	Rp184.071.000	Rp21.181.850	11.51
19	[WA.7613.EBD.955] Layanan Manajemen Keuangan	Dokumen	0	1	Rp41.628.000	Rp10.044.900	24.13
20	[WA.7613.EBD.974] Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	Dokumen	0	0	Rp10.900.000	Rp4.522.650	41.49
Total Anggaran					Rp10.510.432.000	Rp5.672.675.558	53.97

D. Rekomendasi Pimpinan



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Rekomendasi:

[IKK 1.1] Persentase Peserta Didik yang Meningkatkan Kualitas Literasi Membaca

Rekomendasi: selalu berkoordinasi dengan tim kerja Literasi Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra dalam penetapan target; selalu berpedoman pada juknis yang diterbitkan oleh Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra; berkoordinasi dan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan terkait dalam pengundangan peserta dan tempat pelaksanaan kegiatan.

[IKK 1.2] Persentase Produk Penerjemahan yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik

Rekomendasi: selalu berkoordinasi dengan tim kerja Penerjemahan Pusat Pemberdayaan Bahasa; selalu berpedoman pada juknis yang diterbitkan oleh Pusat Pemberdayaan Bahasa.

[IKK 2.1] Persentase Penutur Teruji yang sesuai dengan predikat kemahiran berbahasa profesinya
Rekomendasi: Kuatkan koordinasi dan kolaborasi dengan sekolah/lembaga sasaran; susun jadwal sesuaikan dengan kalender pendidikan; selalu berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan setempat jika targetnya siswa.

[IKK 2.2] Persentase Penutur Bahasa yang Meningkatkan Kualitas Berbahasanya

Rekomendasi: Selalu berkoordinasi dengan Sekretariat Badan untuk informasi buka blokir; selalu berkoordinasi/berkolaborasi dengan pemangku kepentingan terkait untuk pengundangan/penentuan peserta dan tempat pelaksanaan kegiatan; selalu mengacu pada juknis kegiatan yang diterbitkan oleh Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra.

[IKK 3.1] Persentase lembaga terbina yang meningkatkan kualitas penggunaan bahasanya

Rekomendasi: Selalu berkoordinasi dengan Tim Kerja di Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra; Selalu mengacu pada juknis yang diterbitkan oleh Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra; Selalu melibatkan pemangku kepentingan (berkolaborasi) terkait dalam pengundangan peserta dan tempat pelaksanaan kegiatan.

[IKK 3.2] Persentase komunitas penggerak literasi terbina yang meningkatkan kualitas kinerjanya

Rekomendasi: Berkolaborasi dengan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan. Sesuaikan kegiatan dengan anggaran yang tersedia; selalu mengacu pada juknis yang diterbitkan oleh Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra.

[IKK 4.1] Persentase Penambahan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra yang Tervalidasi

Rekomendasi: Berkoodinasi dengan Sekretariat Badan terkait dengan progress buka blokir; melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran, tetapi tetap mengacu pada juknis yang diterbitkan oleh Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra. Berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan.

[IKK 5.1] Persentase Penambahan bahasa, sastra, dan aksara yang terverifikasi dalam peta kebinekaan

Rekomendasi: Selalu berkoordinasi dengan Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra dalam menetapkan target dan pola kegiatan; mengacu pada juknis yang diterbitkan oleh Pusbanglin.



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

[IKK 5.2] Rasio Pengajar Bahasa Daerah Terhadap Penutur Muda yang Terimbas

Rekomendasi: Selalu berkoordinasi dengan Sekretarian Badan terkait dengan progress buka blokir; Mencari pihak penyedia jasa atau EO yang kredibel dan kompeten dalam mengakomodasi pola kegiatan.

[IKK 6.1] Persentase Lembaga Penyelenggara Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) Terasilitasi (Dalam Negeri)

Rekomendasi: Berkoordinasi dengan Sekretariat Badan terkait dengan buka blokir; laksanakan kegiatan dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia dan tetap mengacu pada juknis yang diterbitkan oleh Pustanda.

[IKK 7.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Bahasa Nusa Tenggara Barat

Rekomendasi: Tetap mengacu pada aturan yang ada; segera menyesuaikan dengan nomenklatur baru; dan tetap menjaga akuntabilitas; berkoordinasi intensif dengan Sekretariat adan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

[IKK 7.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Bahasa Nusa Tenggara Barat minimal A

Rekomendasi: Tetap menjaga akuntabilitas, berkoordinasi intensif dengan Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa; berkoordinasi intensif dengan tim internal (penyusun program, pelaporan, keuangan, PPK, dan tim teknis).

Mataram, 28 Agustus 2025

	Ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Balai Bahasa Provinsi NTB Dwi Pratiwi
---	--



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**